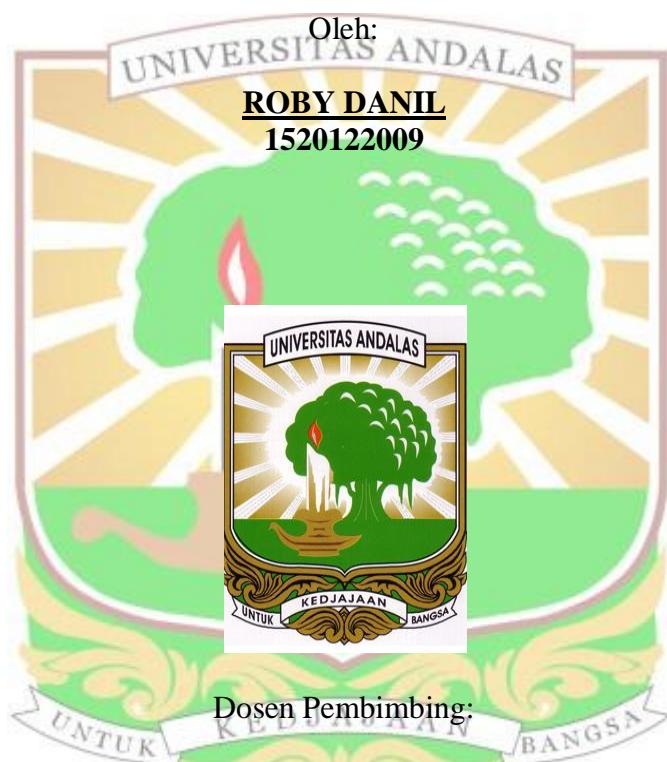


TESIS

EFEKTIVITAS MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS BUKITTINGGI DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Strata 2 Magister Kenotariatan Pada Program Pasca Sarjana Universitas Andalas



Dosen Pembimbing:

1. Dr. Azmi Fendri, S.H, M.Kn
2. H. Frenadin Adeguastara, S.H, M.s

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2017**

EFEKTIVITAS MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS BUKITTINGGI DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS

(Roby Danil, 1520122009, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2017, 102 Halaman)

ABSTRAK

Notaris selaku pejabat umum memiliki lembaga yang mengawasi dan membinanya agar melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan aturan-aturan yang tercantum pada Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014. Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk lembaga Pengawas bagi Notaris yaitu Majelis Pengawas Notaris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Bukittinggi terhadap Notaris pada wilayah kerja Majelis Pengawas Daerah Notaris tersebut sudah berjalan secara efektif mengingat Kantor sekretariat yang terletak jauh dari wilayah kerjanya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan memperhatikan norma hukum, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan pengaplikasian data di lapangan. Pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder, alat pengumpul data berupa dokumen dan wawancara pada sumber yang terkait, analisis data berupa analisis deskriptif yaitu menganalisa data dengan mengumpulkan data-data yang ditemukan di lapangan. Dari hal yang telah diterangkan diatas maka muncul permasalahan mengenai: 1) Apakah pengawasan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Bukittinggi sudah berjalan secara efektif?, 2) Bagaimana proses pemerikasaan oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah Bukittinggi jika terjadi pelanggaran jabatan Notaris oleh Notaris?, 3) Apa tindakan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Bukittinggi terhadap pelanggaran Jabatan Notaris yang dilakukan oleh Notaris?. Dari hasil penelitian berdasarkan ke tiga permasalahan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan kewenangan oleh Majelis Pengawas Daerah belum berjalan Secara Efektif hal ini terjadi dikarenakan faktor sarana dan prasarana penunjang untuk kinerja masih belum memadai mengingat banyaknya jumlah Notaris dan luas wilayah untuk di lakukan pengawasan, serta masih kurangnya perhatian pemerintah untuk lebih serius membenahi aturan-aturan terkait profesi Jabatan Notaris sebagai pejabat umum di Indonesia.

Kata kunci: Efektivitas, Notaris dan Majelis Pengawas Daerah Notaris

THE EFFECTIVENESS OF REGIONAL SUPERVISORY BOARD NOTARIES OF BUKITTINGGI IN CONDUCTING SUPERVISION

(Roby Danil, 1520122009, Post Graduate of Notary Program Faculty of Law Andalas University, 2017, 102 Page)

ABSTRACT

The Notary as public officials have institution that supervising and managing them to implement their duties and obligations in accordance with the regulation that included in the act of office Notary number 30 years 2004 that has been revised to the law number 2 years 2014. According to those law, the Minister of Law and Human Rights established a Supervisory Board for Notary, namely the Notary Supervisory Board. The purpose of this study is to find out whether the implementation of supervision by the regional supervisory board notaries of Bukittinggi against Notaries in the working area of the Notary regional supervisory board has been running effectively considering the office secretariat located far away from its working area. This research uses empirical juridical method that is research conducted by taking into account the legal norms, legislation, expert opinion and application of data in the field. Data collection using primary and secondary data, data collecting tool in the form of documents and interviews on related sources, data analysis in the form of descriptive analysis that is analyzing data by collecting data found in the field. From what has been explained above, there are issues arise as follows: 1) Is the supervision of a Notary conducted by the Regional Supervisory Board of Notary Bukittinggi has been running effectively? 2) How is the process of examination by the Regional Supervisory board of Bukittinggi if there is a breach of notary function by the notary? 3) What is the action made by the regional supervisory board of notary bukittingi against the violation of Notary function by the notary?. From the results of research based on the three issues above shows that the implementation of supervision and authority by the regional supervisory board has not run effectively. This happens because the supporting facilities and infrastructure to support the performance is inadequate considering the number of Notaries and the extensive area for supervision, as well as lack of attention from the government to improve the rules intently related to the profession of notary as public officials in Indonesian.

Keywords: Effectiveness, Notary and Regional Supervisory Board of Notary